PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PROVINSI PEMEKARAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2023

TUGAS AKHIR

SUSI MAHARANI
NIM. B1011171105

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Susi Maharani
NIM	: B1011171105
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran Di Indonesia Periode Tahun 2017 - 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 Maret 2025



Susi Maharani

NIM. B1011171105

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Susi Maharani
NIM	: B1011171105
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 27 Juni 2024
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran Di Indonesia Periode Tahun 2017 - 2023

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 13 Maret 2025



Susi Maharani

NIM. B1011171105

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran Di Indonesia Periode Tahun 2017-2023

Penanggung Jawab Yuridis

Susi Maharani
B1011171105

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	27 Juni 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. NIP 196912011994032004	13/03-2025	
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. NIP 196707071992021001	13/03-2025	
3.	Anggota Penguji	Eko Supriyanto, S.E., M.E. NIP 199101212019031013	12/03-2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 25 MAR 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul ***"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran di Indonesia Periode Tahun 2017-2021"*** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

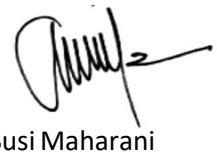
1. Dr. Barkah., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Nurul Bariyah., S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
3. Metasari Kartika., S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Yanto., S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas - Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Romi Suradi., S.E.I, M.E., selaku Ketua Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAPK) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Sekaligus sebagai Dosen

Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.

6. Prof. Dr. Eddy Suratman., S.E., M.A., sebagai Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
7. Kedua orangtuaku, terimakasih atas doa restu, kasih sayang, semangat dan material dalam menyelesaikan studi ini. Motivasi, pengorbanan serta kesabaran yang berlimpah pada penulis sejak kecil sampai saat ini dan seterusnya yang tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan Tugas Akhir ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 01 April 2024



Susi Maharani
B1011171105

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran di Indonesia Periode Tahun 2017-2023

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi pemekaran di Indonesia periode tahun 2017- 2023. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun data berjumlah 40, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 (8 Provinsi). Selanjutnya metode dan alat analisis yang digunakan ialah metode data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pengujian hipotesis. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *Eviews Versi 10.0*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
1) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 3) upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Pemekaran di Indonesia Periode Tahun 2017-2023

Susi Maharani

Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemekaran wilayah diharapkan akan mendorong pengembangan, dan samping itu, dengan adanya daerah baru hasil pemekaran diharapkan akan merangsang terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new economic growth centers*) yang akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakomodasi pengaturan masalah pemekaran daerah sejak reformasi bergulir hingga terakhir dilakukannya pemekaran daerah baru pada Desember 2012, pemerintah telah melakukan 217 pemekaran daerah. Akibatnya, jumlah daerah di tanah air semakin banyak, yakni 34 provinsi dan 502 kabupaten/ kota (Widada dkk, 2014).

Provinsi Gorontalo pemekaran wilayah disebabkan atas dasar peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah (UU RI No 38 Tahun 2020). Pada provinsi Maluku Utara pemekaran provinsi disebabkan oleh kendala teknis administrasi dan fasilitas pendukung pelayanan yang belum memadai, juga terbatasnya komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan sistem dan pelaksanaan pelayanan publik yang baik serta adanya faktor konflik sosial yang sering terjadi akibat pengabaian aspirasi masyarakat (Hasyim, 2010). Provinsi Papua Barat, pemekaran dilakukan atas dasar hal yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari dukungan legislasi untuk mewujudkan pemerataan serta keadilan di bidang pembangunan dan jaminan pemenuhan hak bagi masyarakat Papua.

Dengan adanya pemekaran maka pembangunan dapat diadakan dengan rentang kendali lebih dekat, percepatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan peran dan kedudukan wilayah adat serta budaya sebagai modal

sosial, yang turut memberikan jawaban atas masalah pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Maisari, 2022). Terakhir pada provinsi Sulawesi Barat, pemekaran wilayah disebabkan karena Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah tertinggal dan adanya kesenjangan ekonomi serta pembangunan menjadi alasan utama dilakukannya pemekaran wilayah yang semula tergabung dalam provinsi Sulawesi Selatan (Akbar et al., 2017).

Tujuan dilakukan pemekaran daerah tertuang dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam Bab II pasal 2 UU tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.